BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak hanya persoalan mengenai kemandirian mengatur suatu daerah saja namun dibalik itu juga menyisahkan masalah desentralisasi fiskal yang mengakibatkan pemerintah harus memulai penyesuaian terhadap kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memaksimalkan tujuan desentralisasi fiskal dengan ditetapkannya Undang - Undang No 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD). Produk dari UU tersebut ialah istilah pajak barang dan jasa tertentu atau dapat disingkat menjadi PBJT.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pajak barang dan jasa tertentu, alangkah baiknya mengenal mengenai pengertian dari istilah tersebut. Yang dinamakan barang dan jasa tertentu ialah barang atau jasa yang disalurkan kepada konsumen akhir, sehingga pajak barang dan jasa tertentu dapat dikatakan merupakan pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu yang dibayarkan konsumen akhir dan dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota di lokasi konsumsi barang atau jasa tersebut terjadi. Perhitungannya diserahkan kembali ke wajib pajak, yang merupakan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, sektor-sektor tertentu, atau kegiatan yang penting dalam perekonomian negara, misalnya sektor kesehatan, pendidikan, serta beberapa jenis barang dan jasa lainnya.

Sehingga kesimpulan dari pemaparan diatas ialah barang dan/atau jasa tertentu (PBJT) menggambarkan suatu kelompok barang dan jasa yang mendapatkan perlakuan pajak khusus dalam sistem perpajakan Indonesia dengan melakukan pengecualian atau penggenaan tarif pajak lebih rendah disbanding dengan jenis pajak yang lain yang bertujuan untuk mendukung sektor - sektor vital yang ada dimasyarakat agar harganya masih dapat dijangkau oleh masyarakat, misalnya makanan pokok masyarakat, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lain yang diperlukan oleh masyarakat.

Jenis barang dan atau jasa yang dikenakan PBJT antara lain makanan dan/atau minuman yang tersaji di restoran, kafe, rumah makan dan sejenisnya diperoleh secara langsung dengan datang ke tempat maupun dipesan melalui pesanan termasuk pemesanan yang dilakukan melalui aplikasi, yang kedua adalah jasa perhotelan termasuk didalamnya penyewaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya. Jenis yang ketiga adalah jasa parkir dan yang terakhir ialah jasa kesenian dan hiburan termasuk didalamnya tempat hiburan malam.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau yang sering disebut Jakarta memiliki 6 wilayah kota yakni Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta Kepulauan Seribu. Di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, sektor makanan dan minuman menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi yang signifikan. Hal ini tercermin dari realisasi penerimaan PBJT atas makanan dan/atau minuman yang menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir (2020–2024).

Berdasarkan data dari Suku Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, penerimaan PBJT atas makanan dan/atau minuman menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2020, capaian realisasi penerimaan sebesar Rp 693.579.824.040 mampu melampaui target yang telah ditentukan, yakni Rp 597.770.000.000. Tren positif ini berlanjut pada 2021, dengan realisasi sebesar Rp 770.044.899.352, melampaui target yang ditentukan sebesar Rp 711.190.000.000. Walaupun sempat terjadi penurunan pada 2022, di mana realisasi hanya mencapai Rp 1.260.369.404.987 dibanding target sebesar Rp 1.467.090.720.000, kondisi tersebut kembali membaik pada tahun berikutnya. Pada 2023, realisasi meningkat menjadi Rp 1.469.443.748.115, yang kembali melampaui target sebesar Rp 1.378.025.758.000. Selanjutnya, pada 2024, penerimaan terus menunjukkan peningkatan dengan realisasi mencapai Rp 1.592.674.550.777 dari target sebesar Rp 1.559.410.000.000.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor makanan dan/atau minuman merupakan salah satu penyumbang penting terhadap pendapatan daerah, khususnya di Jakarta Selatan. Meskipun demikian, masih diperlukan pemahaman yang lebih

baik dari para pelaku usaha terkait kewajiban perpajakannya, terutama terkait proses menghitung, membayar, dan melapor PBJT atas makanan dan minuman, agar tercipta kepatuhan yang optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PBJT atas makanan dan/atau minuman memiliki peranan penting dalam mendukung pendapatan daerah, khususnya di Jakarta Selatan. Atas dasar hal tersebut, penulis memutuskan untuk mendalami lebih lanjut topik mengenai jenis pajak daerah ini, khususnya dalam aspek mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporannya serta kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Maka judul karya tulis ilmiah kali ini adalah **"Menghitung, Membayar dan Melaporkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan Minuman : Langkah Mudah untuk Restoran di Jakarta Selatan."**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, pokok permasalahan dalam karya tulis ini yaitu :

1.2.1 Bagaimana mekanisme perhitungan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan?

1.2.2 Bagaimana mekanisme pembayaran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan?

1.2.3 Bagaimana mekanisme pelaporan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan?

1.2.4 Apakah perhitungan, pembayaran, dan pelaporan yang dilakukan oleh para wajib pajak PBJT dan/atau minuman telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak diwujudkan dalam penulisan karya tulis ilmiah akhir ini sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme perhitungan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.3.2 Untuk mengetahui mekanisme pembayaran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.3.3 Untuk mengetahui mekanisme pelaporan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.3.4 Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, pembayaran, dan pelaporan antara yang dilakukan oleh para wajib pajak PBJT dan/atau minuman dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang dapat dirasakan, baik dalam ranah akademik maupun penerapan di lapangan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1.4.1 Untuk Penulis/Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, penulis memperoleh wawasan yang lebih komprehensif terkait mekanisme dalam menghitung, membayar, dan melaporkan PBJT atas makanan dan/atau minuman, serta kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.4.2 Untuk Universitas Kristen Indonesia

Penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik di bidang perpajakan serta menjadi bukti kontribusi mahasiswa Universitas Kristen Indonesia dalam kajian akademik mengenai PBJT atas makanan dan/atau minuman.

1.4.3 Untuk Pembaca

Diharapkan dari karya tulis ilmiah akhir ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan PBJT makanan dan/atau minuman serta kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan secara ringkas susunan laporan yang terbagi ke dalam sejumlah bab beserta subbab yang saling terstruktur. Penyusunannya bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi dari laporan praktik kerja lapangan ini. Adapun tahapan- tahapan penyusunan karya tulis ilmiah akhir ini disajikan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjabaran mengenai landasan pemikiran yang menjadi latar belakang penyusunan karya tulis ilmiah, identifikasi permasalahan yang dibahas, tujuan dari pelaksanaan penelitian, manfaat yang ingin diperoleh, serta sistematika penulisan dari karya ilmiah mahasiswa yang berjudul: Menghitung, Membayar, dan Melaporkan Pajak Barang dan/atau Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman: Langkah Mudah untuk Restoran di Jakarta Selatan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan uraian terkait dasar-dasar teori berkaitan dengan bidang perpajakan, khususnya teori-teori yang mendukung topik karya tulis ilmiah. Referensi tersebut digunakan sebagai pijakan dalam menjelaskan proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan PBJT makanan dan/atau minuman, serta kesesuaiannya dengan regulasi atau peraturan yang berlaku pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Setelah pemaparan teori pada bab sebelumnya, bab ini menguraikan informasi mengenai sejarah, susunan organisasi , arah visi dan misi hingga pembagian tugas dan kewenangan, serta aktivitas operasional dari Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan tempat dilakukan magang kerja oleh penulis.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat ini disajikan hasil analisis dan pembahasan terhadap data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan magang oleh penulis di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang merupakan tempat dilakukan magang kerja oleh penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melalui tahap analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya tersebut, yaitu bab empat, dengan demikian, pada bagian ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya dan memberikan saran jika ada penyimpangan yang terjadi.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI